

Agama dan Kekerasan: Model-Model Penjelasan Analisis atas Kekerasan Bermotif dan Berjustifikasi Religius Dalam Perspektif Hubungan Internasional

Arsita Berliana Putri

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email : sitaaraara@gmail.com

Keywords:

religion; violence; political model; psychopathological model; religio-cultural model; International Relations



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Kata Kunci:

agama; kekerasan; model politis; model psikopatologis; religio-kultural; Hubungan Internasional

Abstract

Religion and violence represent complex phenomena that are frequently associated with global conflicts, particularly when religious symbols, values, and narratives are used to legitimize violent actions. However, religiously motivated violence cannot be understood solely as a consequence of religious teachings, as political, psychological, and social factors also contribute to the emergence of such phenomena. This study aims to analyze explanatory models of religiously motivated and justified violence from the perspective of International Relations. This research employs a qualitative-descriptive approach using a literature review method through conceptual analysis of primary sources and supporting literature related to religion, violence, and international politics. The findings reveal three major models for understanding religious violence: the political model, the psychopathological model, and the religio-cultural model. The political model emphasizes power relations, conflicts, and structural inequalities; the psychopathological model highlights identity crises, alienation, and group dynamics; while the religio-cultural model explains how religious symbols and meaning systems provide legitimacy for violent actions. This study concludes that religious-based violence is a multidimensional phenomenon shaped by the interaction of political, psychological, and cultural factors. Therefore, an integrative analytical approach is required to understand the complexity of religious violence within the field of International Relations.

Abstrak

Agama dan kekerasan merupakan fenomena kompleks yang sering dikaitkan dalam berbagai konflik global, terutama ketika simbol, nilai, dan narasi keagamaan digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan kekerasan. Namun, kekerasan bermotif religius tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat dari ajaran agama, karena terdapat faktor politik, psikologis, dan sosial yang turut membentuk fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model-model penjelasan mengenai kekerasan bermotif dan berjustifikasi religius melalui perspektif Hubungan Internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur (library research) melalui analisis konseptual terhadap sumber utama dan literatur pendukung terkait agama, kekerasan, serta politik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga model utama dalam memahami kekerasan religius, yaitu model politis, psikopatologis, dan religio-kultural. Model politis menekankan aspek kekuasaan, konflik, dan ketidakadilan struktural; model psikopatologis menjelaskan peran krisis identitas, keterasingan, dan dinamika kelompok; sedangkan model religio-kultural menjelaskan bagaimana simbol dan sistem makna

keagamaan dapat memberikan legitimasi terhadap kekerasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan berbasis agama merupakan fenomena multidimensional yang terbentuk melalui interaksi antara faktor politik, psikologis, dan budaya, sehingga membutuhkan pendekatan analisis yang integratif dalam kajian Hubungan Internasional.

PENDAHULUAN

Agama dan kekerasan merupakan dua fenomena yang sering ditempatkan dalam hubungan yang problematis. Dalam berbagai konflik, tindakan kekerasan dapat dilakukan dengan membawa simbol, bahasa, atau justifikasi religius. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan apakah agama merupakan sumber kekerasan atau justru hanya menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk memberikan makna dan legitimasi terhadap tindakan yang pada dasarnya juga dipengaruhi faktor politik, sosial, dan psikologis.

Bab “Kekerasan sebagai Ibadah” dalam buku *Demokrasi dan Sentimentalitas* menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat disederhanakan. Kekerasan yang memperoleh pembenaran religius perlu dibaca melalui beberapa lapisan. Di satu sisi terdapat tujuan dan relasi kekuasaan; di sisi lain terdapat kondisi individu atau kelompok; sementara pada lapisan lain terdapat sistem simbol, nilai, dan identitas yang membuat tindakan tertentu dipandang benar atau bermakna oleh pelakunya.

Persoalan ini relevan bagi Hubungan Internasional karena agama tidak hanya merupakan persoalan privat atau domestik. Agama dapat berhubungan dengan konflik, identitas kolektif, kekuasaan, gerakan transnasional, serta cara aktor memahami dunia politik. Contoh yang dibahas dalam bab, seperti Osama bin Laden dan Al-Qaeda, menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang menggunakan bahasa religius juga berkaitan dengan persepsi terhadap kekuasaan dan modernitas.

Disiplin ilmu Hubungan Internasional (HI) secara tradisional tumbuh dalam kerangka positivisme ilmiah dan paradigma sekularisme Barat. Teori arus utama seperti Realisme dan Liberalisme mengasumsikan bahwa proses modernisasi, perkembangan teknologi, serta penguatan negara-bangsa akan mengikis peran agama dari ranah publik dan politik global. Dalam pandangan sekuler ini, agama ditempatkan semata-mata sebagai urusan privat warga negara, variabel perifer yang irasional, serta tidak relevan bagi kalkulasi kekuasaan dan keamanan nasional. Namun demikian, fenomena kebangkitan kembali agama (*religious resurgence*) pada paruh kedua abad ke-20 hingga era kontemporer membuktikan bahwa agama merupakan fenomena transhistoris dan transkultural yang tidak pernah benar-benar lenyap. Agama terus beradaptasi dan memengaruhi dinamika politik internasional secara mendasar (Haynes, 2021; Bolton, 2024).

Persimpangan antara agama dan politik internasional menjadi semakin kompleks ketika bersentuhan dengan fenomena kekerasan. Secara normatif, agama mengajarkan nilai-nilai perdamaian, kerukunan, dan keadilan sosial. Namun, interpretasi atas doktrin keagamaan dan pembacaan terhadap hubungan sosial sering kali dijadikan alat ideologis untuk melegitimasi serta menjustifikasi tindakan destruktif. Dalam kajian antropologi kekerasan seperti pemikiran Jack David Eller, kekerasan bukanlah perilaku yang berdiri sendiri, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dipicu oleh keterikatan identitas, ideologi kelompok, kepatuhan buta pada otoritas, hingga ketidakadilan struktural. Manifestasi kekerasan berbasis agama mengejawantah dalam berbagai bentuk di panggung dunia, mulai dari perang suci, konflik etno-religius, hingga terorisme transnasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Mark Juergensmeyer, aksi kekerasan keagamaan kerap difungsikan sebagai "teater kekerasan" (*theater of terror*) yang sarat simbolisme perang kosmik untuk mengguncang tatanan politik dan menarik perhatian publik global (lih. Somoano, 2025).

Dalam tatanan politik global, keterlibatan agama terlihat dari menguatnya peran aktor keagamaan transnasional seperti Gereja Katolik Roma maupun Organisasi Kerjasama Islam

(OKI). Penggunaan simbol dan doktrin keagamaan lintas batas, seperti gagasan solidaritas ummah, secara langsung menantang model kedaulatan negara-bangsa konvensional yang berakar pada Perjanjian Westphalia. Di satu sisi, negara-negara modern memobilisasi agama sebagai instrumen soft power dan diplomasi untuk memperkuat kedaulatan serta mencapai tujuan geopolitik. Di sisi lain, agama juga muncul sebagai bentuk resistensi budaya dan politik terhadap ekspansi hegemoni Barat, sekularisme yang dianggap represif, maupun ketidakadilan sistemik global. Peristiwa monumental seperti serangan 11 September 2001, dinamika konflik Israel-Palestina, hingga dimensi keagamaan dalam konflik Rusia-Ukraina menegaskan bahwa isu keagamaan tidak dapat dipisahkan dari analisis keamanan dan tata kelola global kontemporer (Byrnes, 2017; Yang & Li, 2021).

Sebagai landasan penulisan, penelitian ini menggunakan Bab 9 “Kekerasan sebagai Ibadah” dalam Demokrasi dan Sentimentalitas karya F. Budi Hardiman sebagai sumber utama. Sumber tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi tiga model penjelasan politis, psikopatologis, dan religio-kultural yang kemudian ditempatkan dalam kerangka analisis Hubungan Internasional. Dengan demikian, fokus tulisan bukan untuk membuktikan bahwa agama merupakan penyebab kekerasan, melainkan untuk menjelaskan bagaimana dimensi politik, psikologis, dan religio-kultural dapat berinteraksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana model politis, psikopatologis, dan religio-kultural menjelaskan kekerasan bermotif atau berjustifikasi religius, dan apa relevansinya bagi analisis Hubungan Internasional?” Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur, dengan sumber utama berupa bab yang menjadi fokus pembahasan dan analisis konseptual terhadap relevansinya bagi studi Hubungan Internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara statistik, melainkan untuk memahami dan menafsirkan bagaimana ketiga model penjelasan, politis, psikopatologis, dan religio-kultural dapat digunakan untuk membaca fenomena kekerasan bermotif atau berjustifikasi religius, serta bagaimana ketiganya relevan bagi kajian Hubungan Internasional.

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berupa hasil tulisan atau kajian. Sumber sekunder terdiri atas karya tulisan F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 2019) berjudul “Demokrasi dan Sentimentalitas.” Rujukan mengarah pada Bab 9 yang bertajuk “Kekerasan sebagai Ibadah” dalam buku F. Budi Hardiman tersebut. Bab tersebut menjadi landasan utama untuk mengidentifikasi dan merumuskan tiga model penjelasan mengenai relasi agama dan kekerasan. Data sekunder tambahan juga dikumpulkan dan mencakup literatur pendukung di bidang Hubungan Internasional, studi agama, dan kajian kekerasan, antara lain pemikiran Jack David Eller mengenai antropologi kekerasan dan Mark Juergensmeyer mengenai teater kekerasan (*theater of terror*) yang digunakan untuk memperluas dan mempertajam analisis konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*literature review*) terhadap sumber sekunder, dilanjutkan dengan identifikasi konsep-konsep kunci pada masing-masing model penjelasan. Data tersebut kemudian dilengkapi dengan penelusuran literatur tambahan yang relevan dengan tema agama, kekerasan, dan Hubungan Internasional untuk memperkuat konteks analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis konseptual (*conceptual analysis*), yaitu dengan menguraikan karakteristik masing-masing model, membandingkan ketiganya, dan menghubungkannya dengan konsep-konsep dalam studi Hubungan Internasional seperti kekuasaan, identitas, legitimasi, dan aktor transnasional. Melalui proses

ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa ketiga model lebih tepat dipahami secara komplementer daripada saling meniadakan, sekaligus menegaskan relevansinya bagi analisis fenomena kekerasan berbasis agama dalam politik global.

Analytical Framework

Kerangka analitis penelitian ini bertumpu pada tiga model penjelasan mengenai hubungan agama dan kekerasan. Ketiganya digunakan bukan sebagai teori yang saling meniadakan, melainkan sebagai sudut pandang yang dapat digunakan secara berlapis untuk membaca satu fenomena kekerasan yang memiliki dimensi religius.

Model politis memahami kekerasan terutama sebagai bagian dari perjuangan, konflik, atau strategi politik. Pertanyaan yang diajukan bukan hanya keyakinan apa yang dimiliki pelaku, tetapi juga apa tujuan politiknya, siapa targetnya, dan relasi kekuasaan apa yang sedang dipertarungkan. Dalam model ini, kekerasan dapat menjadi instrumen untuk menantang atau melawan tatanan yang dianggap menindas. Karena itu, perhatian diarahkan pada kepentingan, strategi, kekuasaan, hegemoni, dan konflik (Deitch, 2022; Bolton, 2024).

Model psikopatologis mengarahkan perhatian kepada kondisi individu atau kelompok dan pengalaman psikologis yang dapat berhubungan dengan kekerasan. Unsur seperti frustrasi, keterasingan, kebutuhan akan identitas, dan rasa memiliki menjadi penting. Seseorang yang mengalami keterasingan atau krisis identitas dapat menemukan kelompok yang menyediakan rasa diterima dan kerangka identitas baru. Dalam kelompok yang semakin eksklusif, dunia dapat dibayangkan melalui dikotomi “kita” dan “mereka” (Webber & Kruglanski, 2018; Kunst & Obaidi, 2020).

Model religio-kultural melihat kekerasan melalui simbol, nilai, identitas, dan cara suatu komunitas memaknai dunia. Pertanyaan utamanya bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi apa arti tindakan tersebut bagi pelaku. Dalam kerangka ini, tindakan kekerasan dapat dipahami pelaku sebagai pengorbanan, pembelaan terhadap keyakinan, atau tindakan yang memiliki nilai religius. Agama tidak hanya berfungsi sebagai label identitas, tetapi sebagai sistem makna yang dapat membuat suatu tindakan terasa benar atau wajib (Yang & Li, 2021; Deitch, 2022).

Ketiga model tersebut menghasilkan tiga pertanyaan analitis yang saling melengkapi. Model politis bertanya mengenai tujuan politik dan relasi kekuasaan; model psikopatologis bertanya mengenai pengalaman frustrasi, keterasingan, atau kebutuhan identitas; sedangkan model religio-kultural bertanya mengenai bagaimana simbol, nilai, dan keyakinan memberikan makna serta legitimasi terhadap kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama dan Kekerasan: Persoalan Dasar

Kekerasan yang membawa nama atau simbol agama tidak otomatis menunjukkan bahwa agama merupakan penyebab tunggalnya. Agama dapat hadir sebagai sumber motivasi, sistem makna, simbol, maupun legitimasi. Pada saat yang sama, kekerasan dapat dipengaruhi oleh persoalan politik, sosial, ekonomi, identitas, dan kekuasaan. Karena itu, analisis perlu membedakan antara agama sebagai penyebab, agama sebagai sumber motivasi, dan agama sebagai bahasa pembenaran (Haynes, 2021; Deitch, 2022). Perbedaan ini penting agar analisis tidak jatuh pada generalisasi terhadap agama atau komunitas keagamaan secara keseluruhan.

Bab tersebut juga menunjukkan bahwa kekerasan dapat berkaitan dengan penolakan terhadap modernitas dan persepsi mengenai dominasi kekuasaan tertentu. Dalam contoh Osama bin Laden dan Al-Qaeda, kekerasan tidak hanya dibaca dari doktrin agama, tetapi juga dalam konteks perlawanan terhadap kekuasaan dan modernitas yang dipersepsikan sebagai dominasi Barat. Dengan demikian, agama dan politik tidak dapat dipisahkan secara sederhana dalam membaca fenomena tersebut.

Model Politis dalam Menjelaskan Kekerasan Religius

Kekuatan model politis terletak pada kemampuannya menjelaskan konteks struktural dan tujuan tindakan. Contoh Al-Qaeda dapat dibaca melalui perspektif ini karena tindakan kekerasan yang dilakukan tidak terlepas dari konstruksi konflik dengan kekuasaan dan modernitas yang dipandang sebagai dominasi Barat. Pendekatan tersebut mengarahkan perhatian pada kepentingan, strategi, target, serta relasi kekuasaan yang membentuk tindakan.

Dalam perspektif politis, hubungan antara agama dan kekerasan dipahami melalui analisis terhadap struktur sosial, deprivasi sistemis, serta dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan ini menolak anggapan bahwa kekerasan berbasis agama lahir semata-mata dari doktrin teologis yang bersifat irasional. Sebaliknya, kekerasan dipandang sebagai manifestasi dari kegagalan institusional dan ketimpangan struktural yang diciptakan oleh tatanan politik makro. Ketika suatu sistem politik melahirkan eksklusi sosial, marginalisasi ekonomi, diskriminasi distributif, atau tindakan represi negara, tatanan tersebut secara langsung menanamkan benih frustrasi kolektif di kalangan masyarakat. Dalam kondisi demikian, tindakan kekerasan difungsikan oleh kelompok terpinggirkan sebagai sebuah strategi protes untuk menggoyang atau meruntuhkan tatanan kekuasaan yang dinilai tidak adil. Selain faktor deprivasi struktural, pandangan politis juga menyoroti fenomena instrumentalisasi sentimentalitas oleh para elite politik. Dalam konteks perebutan kekuasaan, sentimen keagamaan dan identitas komunal sering kali dimobilisasi secara terencana untuk membangun ikatan emosional kelompok yang bias. Pemanfaatan agama sebagai instrumen politik praktis ini memicu polarisasi tajam di tengah masyarakat, merusak netralitas birokrasi, serta melumpuhkan ruang dialog publik yang rasional. Ketika saluran-saluran politik prosedural dan hukum tidak lagi dipercaya untuk memberikan keadilan, kekerasan fisik maupun verbal diwajibkan sebagai alat perebutan dan pertahanan kekuasaan (Kunst & Obaidi, 2020; Obaidi et al., 2019; Pavlović & Ćorkalo Biruški, 2022).

Dalam lanskap politik internasional, model politis menjelaskan bahwa fenomena radikalisme dan kekerasan keagamaan transnasional sering kali berakar pada reaksi terhadap ketidakadilan sistemik global. Ekspresi kekerasan berbasis agama muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap krisis legitimasi norma global sekuler dan hegemoni material Barat yang dianggap menindas. Tatanan internasional yang berpusat pada negara sering kali menciptakan wilayah-wilayah eksklusi yang memarginalkan populasi tertentu. Kekecewaan atas ketimpangan global ini kemudian diartikulasikan melalui bahasa perlawanan politik yang dikemas dalam bentuk gerakan keagamaan. Dengan demikian, pandangan politis menegaskan bahwa agama bukanlah variabel independen tunggal penyebab kekerasan. Agama hadir sebagai sarana artikulasi ideologis dan pembungkus bagi konflik yang pada dasarnya dipicu oleh perebutan sumber daya, kedaulatan, wilayah, serta keadilan politik. Kekerasan politik berbasis agama tumbuh subur ketika institusi publik mengalami kebangkrutan moral dan gagal menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil bagi seluruh warga (Vasiliev & Zherlitsyna, 2022).

Namun, model politis memiliki keterbatasan apabila digunakan sendirian karena dapat mengurangi arti keyakinan religius yang bagi pelaku mungkin benar-benar menjadi sumber makna dan motivasi. Karena itu, dimensi politik perlu dipadukan dengan model psikopatologis dan religio-kultural agar penjelasan tidak mereduksi agama menjadi sekadar instrumen politik.

Model Psikopatologis dalam Menjelaskan Kekerasan Religius

Model psikopatologis berguna untuk memahami proses keterlibatan individu dan kelompok. Keterasingan, frustrasi, krisis identitas, serta kebutuhan untuk memperoleh rasa memiliki dapat berinteraksi dengan proses radikalisasi atau keterikatan terhadap kelompok yang eksklusif. Dalam kondisi tersebut, dikotomi “kita” dan “mereka” dapat semakin kuat

sehingga kelompok sendiri dipersepsikan sebagai benar, sedangkan kelompok lain ditempatkan sebagai lawan atau ancaman.

Pandangan psikopatologis menjembatani tekanan dari struktur politik makro dengan kondisi kejiwaan individu pada tingkat mikro. Model ini meneliti bagaimana ketimpangan sosial dan eksklusi politik tidak hanya berdampak pada kerugian material, melainkan menembus ke dalam struktur psikologis individu dalam bentuk isolasi sosial dan kesepian eksistensial. Secara kodrati, manusia memiliki ketakutan bawah sadar yang sangat besar terhadap kesendirian dan kehilangan makna hidup. Ketika seorang individu mengalami alienasi dari lingkungannya, timbul kecemasan ontologis mendalam yang mengancam rasa aman dirinya. Di tengah deras arus modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi yang bergerak cepat, banyak individu mengalami disorientasi nilai. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman menciptakan kepanikan eksistensial. Ketika kecemasan mendalam ini tidak terkelola dengan baik, rasa takut mulai mengambil alih fungsi rasio sehat. Dalam situasi keputusan dan ketidakberdayaan psikologis tersebut, individu menjadi sangat rentan untuk mengadopsi teologi maut. Teologi maut menawarkan janji kepuasan transendental yang instan, di mana kematian tidak lagi ditakuti sebagai akhir dari eksistensi, melainkan dirayakan sebagai pintu gerbang menuju kepastian dan pemuliaan diri (Krickel-Choi, 2022; Kinnvall & Mitzen, 2020).

Selain faktor kecemasan individu, pandangan psikopatologis juga menggarisbawahi peran psikologi massa dan dinamika kelompok. Dalam dorongan kelompok, potensi kekerasan individu meningkat secara dramatis karena adanya rangsangan emosional, agitasi, dan irasionalitas kolektif. Proses anonimitas, deindividuasi, serta difusi tanggung jawab membuat individu merasa tidak lagi memikul beban moral secara pribadi atas tindakan destruktif yang dilakukannya. Anggota kelompok dengan mudah menyerahkan ketaatan buta kepada otoritas karismatik dan kehilangan empati terhadap calon korban yang telah diperlakukan secara tidak manusiawi. Dalam konteks hubungan internasional dan psikologi politik, dimensi psikopatologis ini menjelaskan mengapa individu-individu dari latar belakang sosio-ekonomi yang beragam dapat terdorong untuk bergabung dengan jaringan terorisme transnasional. Pengaruh kognitif dan emosional mikro-psikososial ini membentuk identitas aktor yang merasa tidak aman secara ontologis. Bergabung dengan gerakan radikal dan melakukan aksi kekerasan ekstrem memberikan rasa memiliki, kepastian identitas, serta ilusi tujuan hidup yang agung di tengah dunia yang membingungkan (Webber & Kruglanski, 2018) dan (Alghanami, 2026).

Model ini tidak boleh dipahami secara simplistik sebagai anggapan bahwa seluruh pelaku kekerasan memiliki gangguan mental. Fokusnya lebih luas, yaitu bagaimana kondisi psikologis dan pengalaman sosial berinteraksi dengan proses pembentukan identitas dan keterikatan kelompok. Keterbatasannya adalah apabila terlalu menekankan individu, faktor politik, organisasi, dan sistem nilai dapat terabaikan.

Model Religio-Kultural dalam Menjelaskan Kekerasan Religius

Model religio-kultural penting karena menjelaskan mengapa suatu tindakan dapat dipersepsikan sebagai benar, suci, atau bermakna oleh pelaku. Identitas religius menyediakan simbol, nilai, dan kerangka makna yang dapat memberikan legitimasi terhadap tindakan. Persoalan muncul ketika identitas tersebut dibentuk secara sangat eksklusif. Logika “kita” dan “mereka” dapat menghasilkan pemisahan antara kelompok yang dianggap benar atau terpilih dengan kelompok yang dianggap menyimpang atau mengancam.

Pandangan religio-kultural menganalisis bagaimana doktrin keagamaan, simbol-simbol sakral, dan nilai-nilai budaya digunakan untuk memberikan legitimasi moral mutlak terhadap tindakan kekerasan. Pandangan ini berangkat dari pengakuan atas ambivalensi mendasar dalam agama. Di satu sisi, agama memuat nilai-nilai normatif yang mengajarkan kedamaian, cinta kasih, dan peradaban yang membebaskan. Namun di sisi lain, agama juga memiliki dimensi

teologis yang dapat ditarik untuk membenarkan tindakan destruktif ketika doktrin-doktrin keagamaan ditafsirkan secara eksklusif dan dogmatis. Ketika suatu kelompok keagamaan mengadopsi absolutisme teologis, dogma dan teks suci dipahami secara kaku serta tidak membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Dalam kerangka pikir ini, perbedaan pandangan politik atau budaya tidak lagi dilihat sebagai bagian wajar dari kemajemukan, melainkan disakralkan sebagai pertentangan kosmik antara kebenaran ilahi dan kebatilan. Agama difungsikan sebagai penyedia ideologi yang membagi dunia secara dikotomis antara kelompok sendiri yang benar dan pihak luar yang dipandang sebagai musuh yang harus ditundukkan atau dimusnahkan (Deitch, 2022).

Puncak dari model religio-kultural ini terlihat dalam konsep Kekerasan sebagai Ibadah (Gewalt als Gottesdienst). Melalui sakralisasi konflik, tindakan kekerasan ekstrem seperti pembunuhan, perang suci, atau aksi terorisme mengalami transfigurasi makna. Aksi destruktif tersebut dicabut dari karakter kriminalnya dan diangkat menjadi ritual ibadah yang suci, tindakan martir, atau kewajiban teologis untuk memurnikan dunia. Doktrin keagamaan memberikan pembenaran moral absolut yang membebaskan para pelaku dari rasa bersalah sosiologis maupun tuntutan hukum manusia. Dalam panggung politik global, pandangan religio-kultural menyoroti pembentukan kontra-norma transnasional yang menolak tatanan hukum sekuler. Simbol-simbol keagamaan lintas batas dimobilisasi untuk membangun solidaritas identitas kolektif yang menentang hegemoni budaya asing. Dengan menyelubungi konflik geopolitik dalam narasi perjuangan sakral, model religio-kultural mentransfigurasi penderitaan politik konkret menjadi panggilan suci yang melintasi batas-batas teritorial negara (Somoano, 2025; Yang & Li, 2021).

Pembahasan mengenai kekerasan kultural memperlihatkan bahwa kekerasan tidak selalu dimulai dari tindakan fisik. Kekerasan juga dapat berawal dari sistem simbol dan cara pandang yang membuat pihak lain dianggap lebih rendah atau tidak setara. Dengan demikian, analisis religio-kultural membantu menjelaskan proses pemberian makna yang membuat kekerasan dapat diterima atau dibenarkan oleh pelaku.

Ketiga Model sebagai Kerangka Analisis Komplementer

Ketiga model tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai penjelasan yang saling meniadakan. Sebaliknya, ketiganya dapat digunakan untuk membaca satu kasus secara bertahap. Model politis mengidentifikasi tujuan dan relasi kekuasaan; model psikopatologis menelusuri pengalaman individu serta kebutuhan identitas; sedangkan model religio-kultural menjelaskan simbol, nilai, dan keyakinan yang memberikan makna serta legitimasi.

Dengan menggabungkan ketiganya, analisis dapat menghindari dua reduksionisme. Pertama, reduksionisme yang menganggap agama sebagai penyebab tunggal kekerasan. Kedua, reduksionisme yang menganggap agama hanya sebagai topeng bagi kepentingan politik. Agama dapat memiliki peran yang nyata sebagai sumber makna, sementara tindakan yang menggunakan makna tersebut tetap berlangsung dalam struktur politik dan sosial tertentu.

Relevansi bagi Hubungan Internasional

Dalam Hubungan Internasional, ketiga model memberikan cara untuk memahami kekerasan sebagai fenomena yang melampaui batas negara. Model politis membantu melihat bagaimana konflik kekuasaan, hegemoni, dan persepsi terhadap tatanan internasional dapat membentuk tindakan aktor. Model psikopatologis membantu memahami mengapa individu dapat tertarik pada kelompok kekerasan yang memiliki jaringan dan agenda transnasional. Model religio-kultural membantu menjelaskan bagaimana identitas dan simbol dapat membangun solidaritas lintas batas serta membentuk persepsi mengenai kawan dan lawan.

Persimpangan antara agama, kekerasan, dan hubungan internasional tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan satu penjelasan saja. Analisis konvensional dalam disiplin

Hubungan Internasional yang didominasi oleh paradigma Realisme dan Liberalisme klasik kerap mengalami kepincangan epistemologis karena menempatkan agama sebagai variabel modifikasi (variabel tambahan) yang irasional atau semata-mata sebagai alat politik material. Padahal, kekerasan global bermotif keagamaan merupakan produk dari lingkaran umpan balik sirkular (circular feedback loop) yang mengintegrasikan dimensi politis-struktural, psikopatologis-individual, dan religio-kultural-normatif secara simultan (Bolton, 2024; Haynes, 2021).

Melalui lensa Konstruktivisme Sosial dan Psikologi Politik dalam Hubungan Internasional, ketiga dimensi ini saling mengonstitusi satu sama lain di panggung politik dunia. Integrasi multidimensional ini bekerja melalui tiga tahapan yang saling mengikat (Kinnvall & Mitzen, 2020):

- a) Tingkat Struktural-Politis (Deprivasi Material Global): Tatanan internasional yang berpusat pada negara (state-centric) serta sistem ekonomi global yang tidak setara menciptakan deprivasi material, represi, dan eksklusi sosial. Ketiadaan keadilan distributif dan kegagalan institusi politik dalam menampung aspirasi publik menghasilkan akumulasi kekecewaan serta krisis legitimasi tatanan global sekuler (Kunst & Obaidi, 2020; Obaidi et al., 2019).
- b) Tingkat Mikro-Psikopatologis (Krisis Ontologis Individu): Deprivasi dan eksklusi struktural tersebut tidak berhenti pada tataran sosial, melainkan juga diterjemahkan ke dalam kondisi kejiwaan individu. Individu mengalami alienasi, kecemasan ontologis, dan kehilangan visi hidup di tengah disrupsi modernitas. Rasa tidak aman secara ontologis ini mendorong individu untuk mencari perlindungan dalam identitas kelompok yang menawarkan kepastian mutlak (Krickel-Choi, 2022).
- c) Tingkat Religio-Kultural (Sakralisasi Ideasional): Kecemasan psikologis dan protes politik tersebut memperoleh bentuk yang paling destruktif ketika bertemu dengan absolutisme doktrinal. Agama menyediakan kerangka pemaknaan absolut yang mensakralkan konflik politik sekuler sebagai pertarungan kosmik. Kekecewaan politik dan kecemasan eksistensial ditransfigurasi menjadi komitmen teologis yang suci melalui narasi Kekerasan sebagai Ibadah (Yang & Li, 2021).

Interaksi komplementer ini menjelaskan mengapa gerakan radikalisme dan terorisme transnasional mampu berkembang pesat dalam skala global. Deprivasi politik menyediakan sasaran musuh yang konkret, krisis psikopatologis menyiapkan kondisi mental individu untuk melepas ketaatan moral pribadi, dan absolutisme religio-kultural memberikan legitimasi sakral yang membebaskan pelaku dari rasa bersalah. Tanpa adanya deprivasi politik dan krisis kejiwaan, doktrin agama tidak akan mudah dipelintir menjadi alat teror; sebaliknya, tanpa legitimasi religio-kultural, protes politik hanya akan berada pada tingkat perjuangan sekuler yang terikat pada kalkulasi rasionalitas praktis (Pavlović & Čorkalo Biruški, 2022; Vasiliev & Zherlitsyna, 2022).

Implikasi bagi resolusi konflik internasional menegaskan bahwa penanganan kekerasan berbasis agama tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan militeristik atau pendekatan keamanan semata. Tindakan represif yang mengabaikan akar masalah justru akan memperpanjang lingkaran kekerasan. Langkah strategis yang diperlukan adalah penataan kembali tatanan politik yang adil untuk menghapus deprivasi struktural, pemulihan kesehatan psikososial warga dari isolasi sosial, serta pemulihan ruang publik yang deliberatif. Dalam masyarakat pasca-sekular (post-secularism), agama ditantang untuk keluar dari dogma kaku dan mengartikulasikan nilai-nilai etis humanisnya dalam bahasa politik yang universal, inklusif, dan komunikatif. Melalui penumbuhan keberanian sipil (civil courage) serta penguatan rasionalitas komunikatif lintas budaya dan kepercayaan, sakralisasi kekerasan dapat diurai, sehingga agama kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai sumber solidaritas, keadilan, dan perdamaian bagi tatanan internasional (Byrnes, 2017; Haynes, 2021).

Kasus Al-Qaeda yang dibahas dalam sumber utama memperlihatkan relevansi tersebut. Fenomena tersebut tidak cukup dipahami sebagai persoalan agama semata. Ia juga berkaitan dengan persepsi mengenai dominasi, modernitas, dan kekuasaan. Pada saat yang sama, bahasa dan simbol religius memberi kerangka makna yang membuat tindakan kekerasan dapat dipahami oleh pelaku sebagai sesuatu yang memiliki legitimasi.

Dengan demikian, studi Hubungan Internasional perlu memperlakukan agama sebagai salah satu variabel yang dapat berinteraksi dengan kekuasaan, identitas, konflik, dan proses transnasional. Aktor tidak selalu bertindak berdasarkan kalkulasi material semata; mereka juga bertindak berdasarkan cara mereka memahami dunia. Namun, pengakuan terhadap dimensi religius tidak berarti bahwa agama harus ditempatkan sebagai penjelasan tunggal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan yang bermotif atau memperoleh justifikasi religius tidak dapat dipahami melalui satu perspektif tunggal, melainkan perlu dianalisis melalui keterkaitan tiga model utama, yaitu model politis, psikopatologis, dan religio-kultural. Model politis menjelaskan bahwa kekerasan dapat berkaitan dengan konflik kekuasaan, ketidakadilan struktural, serta kepentingan politik yang menggunakan simbol agama sebagai sarana mobilisasi. Model psikopatologis memperlihatkan bahwa faktor individu dan kelompok, seperti krisis identitas, keterasingan, serta kebutuhan akan rasa memiliki, dapat berkontribusi terhadap proses keterikatan pada kelompok ekstrem. Sementara itu, model religio-kultural menjelaskan bagaimana simbol, nilai, dan interpretasi keagamaan dapat memberikan makna serta legitimasi terhadap tindakan kekerasan bagi para pelakunya. Dengan demikian, agama tidak dapat diposisikan sebagai penyebab tunggal kekerasan, tetapi sebagai salah satu unsur yang berinteraksi dengan faktor politik, sosial, psikologis, dan budaya dalam membentuk fenomena kekerasan di tingkat global.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian melalui pendekatan empiris dengan menganalisis kasus-kasus kekerasan berbasis agama tertentu dalam konteks hubungan internasional, baik melalui studi komparatif antarnegara maupun kajian terhadap aktor transnasional. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan kerangka analisis dengan memasukkan variabel lain seperti peran media digital, dinamika jaringan sosial, kebijakan keamanan internasional, serta proses deradikalisasi. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hubungan internasional, psikologi politik, sosiologi agama, dan kajian budaya diperlukan agar pemahaman mengenai hubungan agama dan kekerasan menjadi lebih komprehensif serta mampu menjelaskan kompleksitas faktor yang membentuk tindakan kekerasan bermotif religius.

PENDANAAN

Penelitian ini dilaksanakan secara mandiri tanpa memperoleh dukungan finansial dari lembaga, institusi, perusahaan, maupun pihak eksternal lainnya. Seluruh kebutuhan penelitian, mulai dari pelaksanaan, pengumpulan dan pengolahan data, analisis, hingga penyusunan manuskrip, ditanggung secara mandiri oleh penulis.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan penelitian maupun penyusunan manuskrip ini. Penelitian tidak melibatkan hubungan komersial, finansial, kelembagaan, maupun kepentingan pribadi yang berpotensi memengaruhi objektivitas, proses penelitian, maupun interpretasi hasil..

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis bertanggung jawab secara penuh atas seluruh tahapan penelitian, meliputi konseptualisasi, perumusan metodologi, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil, penyusunan manuskrip, hingga proses revisi. Penulis juga telah meninjau dan menyetujui versi akhir manuskrip serta bertanggung jawab atas seluruh isi dan integritas karya ilmiah yang disampaikan.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Dalam penyusunan manuskrip ini, penulis menggunakan bantuan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) secara terbatas untuk perbaikan tata bahasa dan pengecekan kebahasaan. AI tidak digunakan untuk menghasilkan data, melakukan analisis, menentukan hasil penelitian, atau menyusun interpretasi ilmiah. Seluruh substansi, data, hasil analisis, interpretasi, dan kesimpulan tetap menjadi tanggung jawab penuh penulis.

REFERENSI

- Alghanami, B. H. (2026). Psychological Pathways to Extremism: Radical Beliefs and the Rise of Violence in the Muslim World—A Case Study of Religious Alienation. *Politics and Religion Journal*, 20(1), 125–149.
- Bolton, D. (2024). Security, society, and the perennial struggles over the sacred: Revising the wars of religion in international relations theory. *International Organization*, 78(2). <https://doi.org/10.1017/S0020818324000109>
- Byrnes, T. A. (2017). Sovereignty, supranationalism, and soft power: The Holy See in international relations. *The Review of Faith & International Affairs*, 15(4), 6–20. <https://doi.org/10.1080/15570274.2017.1392140>
- Deitch, M. (2022). Is religion a barrier to peace? Religious influence on violent intrastate conflict termination. *Terrorism and Political Violence*, 34(7), 1454–1470. <https://doi.org/10.1080/09546553.2020.1792446>
- Hardiman, F. B. (2019). *Demokrasi dan Sentimentalitas*. Kanisius. Bab 9, “Kekerasan sebagai Ibadah”, hlm. 121–145.
- Haynes, J. (2021). Religion and international relations: What do we know and how do we know it? *Religions*, 12(5), Article 328. <https://doi.org/10.3390/rel12050328>
- Kinnvall, C., & Mitzen, J. (2020). Anxiety, fear, and ontological security in world politics: Thinking with and beyond Giddens. *International Theory*, 12(2), 240–256. <https://doi.org/10.1017/S175297192000010X>
- Krickel-Choi, N. C. (2022). The concept of anxiety in ontological security studies. *International Studies Review*, 24(3), Article viac013. <https://doi.org/10.1093/isr/viac013>
- Kunst, J. R., & Obaidi, M. (2020). Understanding violent extremism in the 21st century: The (re)emerging role of relative deprivation. *Current Opinion in Psychology*, 35, 55–59. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.03.010>
- Obaidi, M., Bergh, R., Akrami, N., & Anjum, G. (2019). Group-based relative deprivation explains endorsement of extremism among Western-born Muslims. *Psychological Science*, 30(4), 596–605. <https://doi.org/10.1177/0956797619834879>
- Obaidi, M., & Kunst, J. R. (2025). The role of relative deprivation in the process of radicalization into violent extremism. In M. Obaidi & J. R. Kunst (Eds.), *The Cambridge handbook of the psychology of violent extremism*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009407892>
- Pavlović, T., & Čorkalo Biruški, D. (2022). Egoistic and fraternalistic relative deprivation in the prediction of support for political violence and violent intentions. *Journal for Deradicalization*, (31), 1–34.

- Somoano, I. B. (2025). Rethinking religion and radicalization: Terrorism and violence twenty years after 9/11 [Review of the book]. *International Affairs*, 101(5), 1929–1931. <https://doi.org/10.1093/ia/iiaf155>
- Vasiliev, A. M., & Zherlitsyna, N. A. (2022). The evolution of Al-Qaeda: Between regional conflicts and a globalist perspective. *Herald of the Russian Academy of Sciences*, 92(Suppl. 13), S1240–S1246. <https://doi.org/10.1134/S1019331622190091>
- Webber, D., & Kruglanski, A. W. (2018). The social psychological makings of a terrorist. *Current Opinion in Psychology*, 19, 131–134. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.024>
- Yang, Z., & Li, L. (2021). Positioning religion in international relations: The performative, discursive, and relational dimension of religious soft power. *Religions*, 12(11), Article 940. <https://doi.org/10.3390/rel12110940>